

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA DENPASAR

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DENPASAR**

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KOTA DENPASAR**

2021

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA DENPASAR 2021

ISBN: 9786026395412
Nomor Publikasi: 51710.2115
Katalog: 4102004.5171

Ukuran Buku: 17,5 cm x 25 cm
Jumlah Halaman: xiv + 60 halaman

Naskah:
BPS Kota Denpasar

Gambar Kulit:
BPS Kota Denpasar

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
Jl. Mulawarman No. 11, Denpasar
Telp. (0361) 418770 Fax. (0361) 434326
E-mail: bps5171@bps.go.id

Dicetak Oleh:
Percetakan Arysta
Jl. Jayagiri XIII No. 29, Denpasar

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2021 merupakan publikasi yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Denpasar. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan Dinas terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan terbitan yang akan datang. Kami juga mengembangkan diskursus yang berkualitas untuk mengawal pembangunan ekonomi Kota Denpasar. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Denpasar, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Denpasar

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Eman Sulaeman, SST., M.A.P

DAFTAR ISI

1. KEPENDUDUKAN

1

2. KESEHATAN DAN GIZI

11

3. PENDIDIKAN

19

4. KETENAGAKERJAAN

27

5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

35

6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

39

7. KEMISKINAN

49

8. SOSIAL LAINNYA

55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2015-2021	3
Tabel 1.2	Indikator Kependudukan Kota Denpasar, 2017-2021	5
Tabel 1.3	Proporsi Wanita Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	7
Tabel 1.4	Persentase Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	8
Tabel 2.1	Persentase Persalinan Menurut Penolong Persalinan Terakhir di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	13
Tabel 2.2	Tingkat Morbiditas Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	14
Tabel 2.3	Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	15
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Tetapi Tidak Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020	16
Tabel 2.5	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan dan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020	17
Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020	20
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020	21

Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020	23
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020	23
Tabel 3.5	Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, Tahun Ajaran 2017/2018-2019/2020	25
Tabel 4.1	TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	27
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	29
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	30
Tabel 4.4	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	32
Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Denpasar, 2019-2020	36
Tabel 5.2	Distribusi Pendapatan Kota Denpasar (Persen), 2016-2020	37
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020 ..	41
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020 .	42
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	42
Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	43
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	45

Tabel 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	47
Tabel 7.1	Indikator Kemiskinan Kota Denpasar, 2019-2021	50
Tabel 8.1	Persentase Rumah Tangga Yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	55
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	57
Tabel 8.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	58
Tabel 8.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	59
Tabel 8.5	Persentase Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	60

DAFTAR GAMBAR

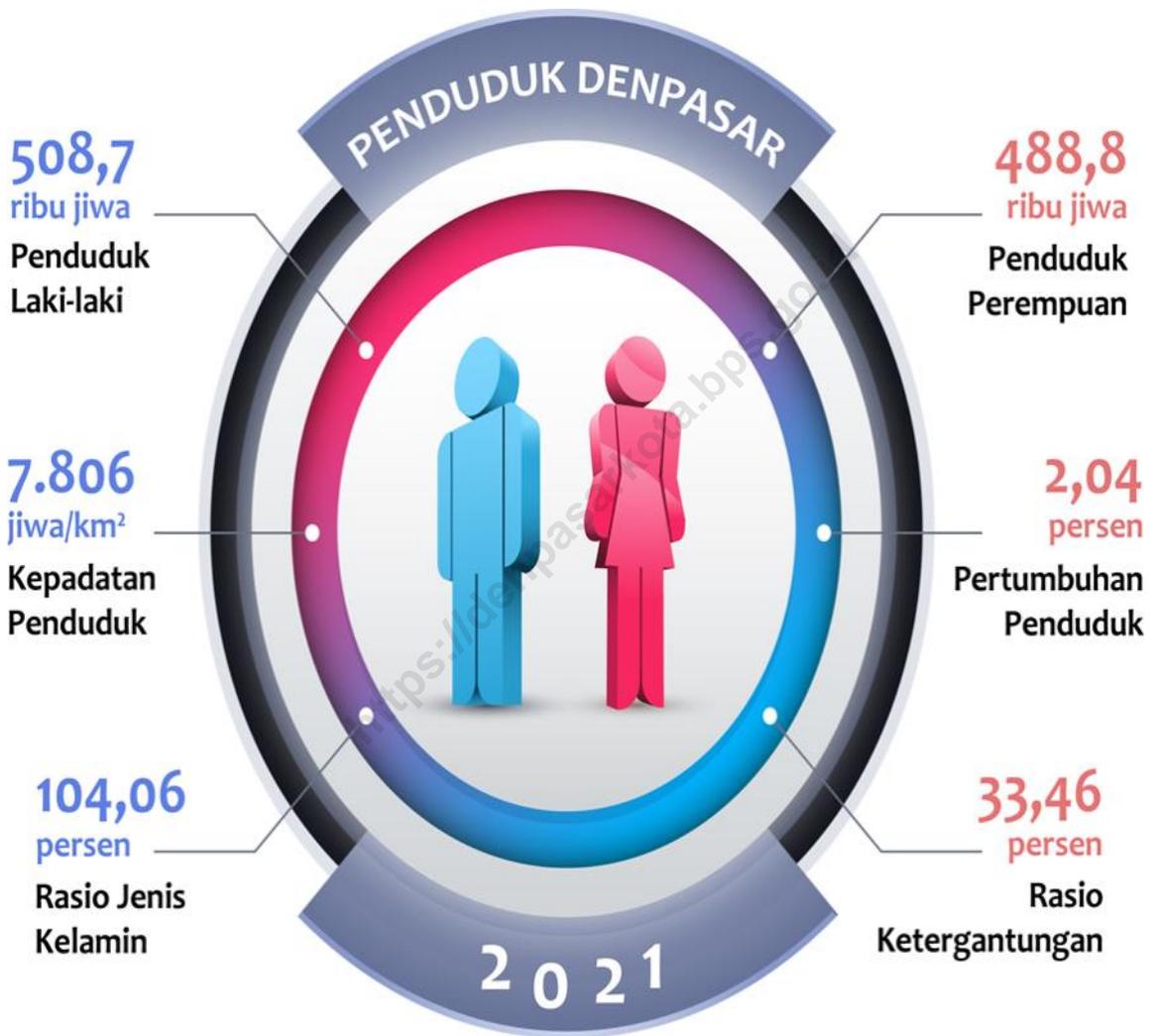
Gambar 1.1	Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (Persen) Kota Denpasar, 2017-2021	2
Gambar 1.2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Denpasar, 2017-2021	3
Gambar 1.3	Piramida Penduduk Kota Denpasar, 2020	4
Gambar 1.4	Kepadatan Penduduk Kota Denpasar (Jiwa/Km), 2017-2020	4
Gambar 1.5	Rasio Ketergantungan Kota Denpasar (Persen), 2017-2021	5
Gambar 1.6	Proporsi Penduduk Usia 60 Tahun Ke Atas di Kota Denpasar (Persen), 2010-2020	6
Gambar 1.7	Usia Perkawinan Pertama Perempuan di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020	7
Gambar 2.1	Angka Harapan Hidup Kota Denpasar dan Bali (Tahun), 2016-2020	12
Gambar 5.1	Persentase Pengeluaran Per Kapita Kota Denpasar Menurut Jenis Pengeluaran (Persen), 2016-2020	36
Gambar 5.2	Pengeluaran Per Kapita Kota Denpasar Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah), 2016-2020 ..	37
Gambar 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar, 2017-2021	50
Gambar 7.2	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Denpasar, 2017-2021	51

MAKLUMAT:

Selain **Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2021** juga diterbitkan **Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2021**

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2021 hanya menampilkan tabel-tabel pokok hasil Susenas 2021

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2021 menyajikan analisis lebih lanjut dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2021, dilengkapi indikator terkait lainnya dari berbagai sumber



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DENPASAR

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan. Dalam hal ini penduduk tidak hanya diposisikan sebagai subjek namun juga sebagai objek pembangunan. Tujuan akhir pembangunan suatu negara adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi penyediaan sumber daya manusia (SDM) dalam menentukan berbagai perencanaan dan evaluasi pembangunan. Namun hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduknya, terutama dari sisi kesehatan dan pendidikan.

Sebagai objek pembangunan, seluruh program pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari penduduk, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

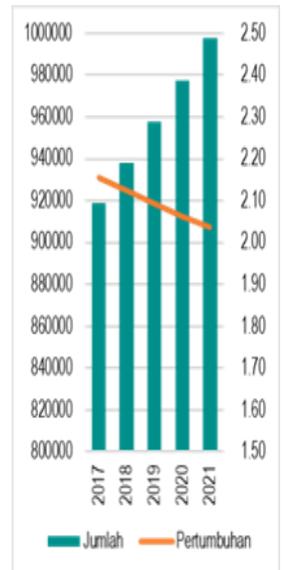
Pembangunan di bidang kependudukan bukanlah hal yang mudah. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya, penduduk bisa menjadi beban dalam pembangunan. Beban tersebut diantaranya pengangguran yang tinggi, kriminalitas meningkat, dan perekonomian yang buruk. Selain kualitas penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk juga sudah menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Denpasar. Potensi dan permasalahan kependudukan dapat terlihat dari penggambaran karakteristik penduduk baik dari sisi jumlah, laju, komposisi umur, maupun sebaran antar wilayahnya.

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Dari segi jumlah, penduduk Denpasar cukup banyak dibandingkan jumlah total penduduk Bali. Dengan jumlah penduduk sekitar 997,5 ribu orang di tahun 2021, angka ini hampir mencapai seperempat jumlah penduduk Bali yang berjumlah sekitar 4,47 juta orang (Proyeksi SUPAS 2015). Kota Denpasar diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Kotamadya pada tanggal 27 Februari 1992 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992. Dengan demikian Sensus Penduduk yang pertama kali dilaksanakan di Kota Denpasar (setelah lepas dari Kabupaten Badung) adalah Sensus Penduduk tahun 2000. Pada pelaksanaan Sensus Penduduk di tahun 2000, jumlah penduduk Denpasar hanya sebesar 532 ribu jiwa. Jumlah ini terus bertambah, hingga di tahun 2021 jumlah penduduk Denpasar diproyeksikan hampir mendekati dua kali lipat (*doubling population*) jumlah penduduk tahun 2000.

Denpasar dapat dikatakan memiliki pertumbuhan penduduk paling cepat dibanding daerah lainnya di Bali, laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada beberapa tahun terakhir menunjukkan tren berfluktuasi cenderung menurun. Meskipun Kota Denpasar pertama kali melaksanakan Sensus Penduduk pada tahun 2000, namun jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui dari jumlah penduduk pada kecamatan yang sama saat masih menjadi bagian Kabupaten Badung. Laju pertumbuhan penduduk Denpasar pada tahun 1980-1990 sebesar 4,05% dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi dalam 3 dasa warsa terakhir. Memasuki periode tahun 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk sempat melambat dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun di tahun 2000 mencapai 3,20%. Laju pertumbuhan ini terus meningkat hingga pada Sensus Penduduk di tahun 2010 mencapai angka 4,01% per tahun. Pada tahun 2015 dilaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) sebagai sumber data proyeksi.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk (Jiwa) dan
Pertumbuhan Penduduk
Kota Denpasar (Persen),
2017-2021



Sumber: Proyeksi Penduduk 2015-2025

Tabel 1.1. Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin, 2015-2021 (ribu jiwa)

Jenis Kelamin	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laki-laki	449.5	459.2	469.0	478.8	488.7	498.6	508.7
Perempuan	430.5	440.1	449.7	459.4	469.1	478.9	488.8
Jumlah	880.0	899.3	918.7	938.2	957.8	977.6	997.5

Sumber: Proyeksi Penduduk Kota Denpasar SUPAS 2015

Ditinjau dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/*sex ratio* (SR) antara penduduk laki-laki dan perempuan di Denpasar relatif berimbang, meskipun jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Selama kurun waktu 2015-2021, *sex ratio* penduduk Denpasar berada pada kisaran 104. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Denpasar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, dengan perbandingan terdapat 104 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan .

Gambar 1.2
Rasio Jenis Kelamin
Penduduk Kota Denpasar,
2017-2021



Sumber: Proyeksi Penduduk 2015-2025

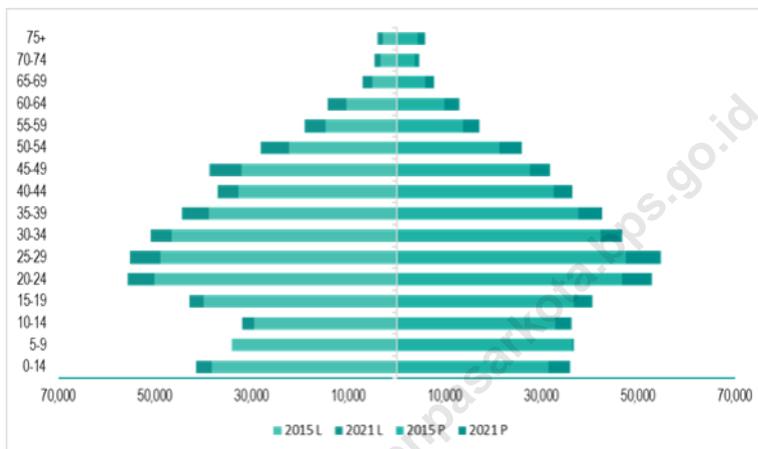
Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Selain laju pertumbuhan penduduk, yang juga menjadi fokus dalam pengendalian masalah penduduk adalah sebaran dan kepadatan penduduk. Sebaran penduduk relatif lebih dipengaruhi oleh pola migrasi baik migrasi ke luar maupun migrasi masuk. Pola migrasi ini terkait dengan faktor pendorong dari daerah asal migran dan besarnya tarikan dari daerah tujuan migrasi. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Bali, Denpasar tidak hanya memiliki daya tarik obyek wisata dan atraksi budaya. Perkembangan ekonomi Denpasar khususnya di sektor pariwisata, menciptakan cukup banyak lapangan kerja yang menarik para pencari kerja.

Gambaran piramida penduduk Denpasar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir memperlihatkan bagaimana perkembangan penduduk Denpasar lebih dipengaruhi oleh faktor non-alamiah yakni

migrasi. Perkembangan piramida penduduk yang cenderung melebar antara tahun 2015 dan 2021, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur, bukan semata diakibatkan oleh pergeseran antar kelompok umur (kohor), namun akibat penambahan dari penduduk luar di masing-masing kelompok umurnya.

Gambar 1.3
Piramida Penduduk Kota Denpasar, 2021



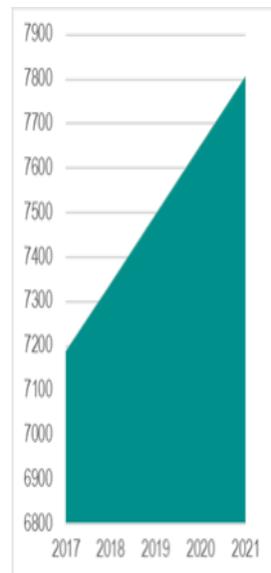
Sumber: Proyeksi Penduduk Kota Denpasar SUPAS 2015

Ketimpangan sebaran penduduk juga dapat dilihat dari kepadatan penduduknya. Denpasar tergolong kota yang sangat padat di Provinsi Bali. Dengan luas yang kurang dari 3% (127,27 km) dari total luas wilayah Bali (5.780,06 km), kepadatan penduduk Denpasar di tahun 2021 mencapai 7.806 jiwa per km². Angka ini sangat jauh di atas tingkat kepadatan Provinsi Bali yang hanya sebesar 773 jiwa per km².

Angka Beban Ketergantungan

Rasio antara penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif dikenal dengan angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya

Gambar 1.4
Kepadatan Penduduk
Kota Denpasar (Jiwa/Km²),
2017-2021



Sumber: Proyeksi Penduduk 2015-2025

beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Semakin besar penduduk non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, maka semakin besar angka beban ketergantungannya. Secara ekonomi, hal ini juga menggambarkan besarnya beban ekonomi penduduk yang bekerja (produktif) untuk menanggung penduduk yang belum bekerja dan tidak bekerja lagi (non produktif).

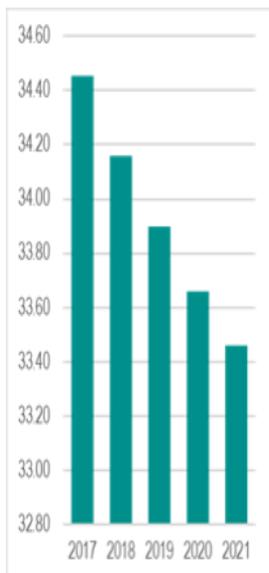
Tabel 1.2. Indikator Kependudukan Kota Denpasar, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	918.7	938.2	957.8	977.6	997.5
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	7 189	7 342	7 496	7 650	7 806
Rasio Jenis Kelamin (Persen)	104.29	104.23	104.17	104.12	104.06
Rasio Beban Tanggungan (Persen)	34.45	34.16	33.90	33.66	33.46

Sumber: Proyeksi Penduduk Kota Denpasar SUPAS 2015

Dari perbandingan komposisi antara penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), penduduk Denpasar tergolong dalam penduduk produktif karena angka rasio ketergantungannya saat ini di bawah 50. Denpasar saat ini dapat dikatakan sudah memasuki masa Bonus Demografi (BD), yang secara harfiah berarti komposisi struktur umur penduduk idealnya mampu memberikan keuntungan secara ekonomi akibat besarnya penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja. Untuk bisa berhasil meraih peluang emas yang dikenal dengan “*the windows of opportunity*” ini, tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan

Gambar 1.5
Rasio Ketergantungan
Kota Denpasar (Persen),
2017-2021



Sumber: Proyeksi Penduduk 2015-2025

lapangan kerja yang mampu menampungnya.

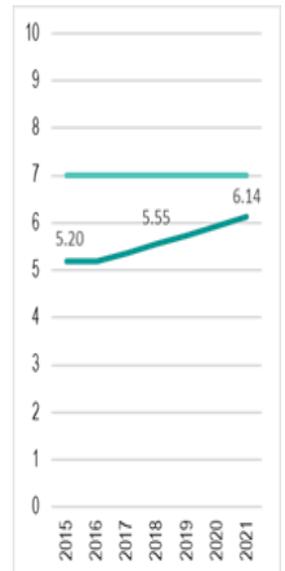
Ageing population merupakan isu kependudukan terkini yang terkait pula dengan komposisi penduduk. Secara natural, manusia atau penduduk akan bergerak menuju masa ini. Ketika komposisi penduduk berusia 60 tahun ke atas semakin banyak, suatu negara atau wilayah dikatakan mengalami *ageing population*. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya tingkat fertilitas dan tingkat kematian, serta semakin panjangnya usia harapan hidup penduduk. Pada tahun 2021 ini, populasi penduduk Denpasar bisa dikatakan belum memasuki *ageing population*, meskipun demikian jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas terus meningkat. Hal ini tentu berdampak pada ketersediaan jaminan hari tua, serta berbagai fasilitas pendukung penduduk bagi kelompok lanjut usia ini.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Tingkat fertilitas tidak terlepas dari usia perkawinan pertama penduduk perempuan. Semakin dini usia perkawinan, semakin panjang rentang masa reproduksi dan semakin besar peluang melahirkan lebih banyak anak. Usia perkawinan pertama juga menjadi indikator kesehatan khususnya bagi perempuan. Perkawinan di usia terlalu muda meningkatkan risiko pada kematian bayi yang dilahirkan. Perkawinan di usia muda memperkecil peluang perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ini terkait dengan kematangan fisik dan mental serta pengetahuan reproduksi bagi perempuan di kala melahirkan dan merawat anak yang dilahirkannya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. Namun demikian dalam undang-undang perlindungan anak, batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 18 tahun. Di sisi lain, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Gambar 1.6
Proporsi Penduduk Usia 60
Tahun Ke Atas di Kota
Denpasar (Persen),
2017-2021



Sumber: Proyeksi Penduduk 2015-2025

terus menggalakkan bahwa usia perkawinan ideal perempuan adalah pada saat umur 21 tahun.

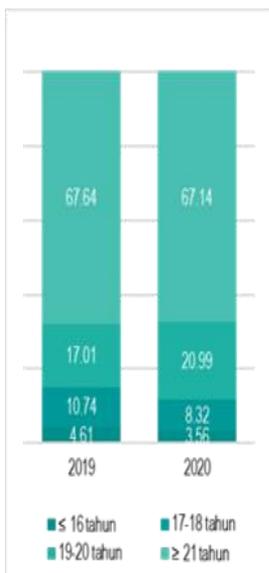
Tabel 1.3. Proporsi Wanita Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Kelompok Umur	2018	2019	2020
≤ 16 tahun	2.29	4.61	3.56
17-18 tahun	14.78	10.74	8.32
19-20 tahun	18.24	17.01	20.99
≥ 21 tahun	64.69	67.64	67.14

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Sebagian besar wanita di Denpasar menikah pada umur ideal (≥ 21 tahun) dengan persentase sebesar 67,14% di tahun 2020, turun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 67,64%. Mengacu ke Undang-Undang Perkawinan, proporsi wanita dengan perkawinan pertama berumur di atas 19 tahun hampir mencapai 90 persen, tepatnya 88,13%. Namun demikian masih ditemukan 3,56% perempuan yang menikah pada umur yang sangat belia, yaitu antara 10-16 tahun yang mana seharusnya mereka sedang mengenyam pendidikan dasar hingga menengah.

Gambar 1.7
Usia Perkawinan Pertama Perempuan di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Penggunaan Alat/Cara KB

Penurunan tingkat fertilitas tidak terlepas dari peranan pemerintah melalui program Keluarga Berencana (KB). Melalui program ini, intervensi terhadap faktor pertumbuhan penduduk dilakukan dengan menggalakkan penggunaan alat kontrasepsi atau lebih dikenal dengan alat KB. Dengan berbagai programnya, program KB diharapkan mampu meningkatkan cakupan akseptor KB terutama penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implant, termasuk penggunaan metode kontrasepsi permanen/steril seperti vasektomi dan tubektomi.

Persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin dan sedang menggunakan alat kontrasepsi meningkat dari 44,54% di tahun 2019 menjadi 51,98% di tahun 2020. Meskipun demikian, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (tubektomi, vasektomi, spiral, implan) berkurang menjadi sebesar 34,20%. Hal ini dimungkinkan oleh meningkatnya metode menyusui alami yang sebesar 31,10% pada tahun 2020. Selain itu, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin dan menggunakan metode kontrasepsi permanen/steril menunjukkan penurunan. Di tahun 2019 persentasenya mencapai 16,92%, kemudian di tahun 2020 turun menjadi sebesar 8,76%.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Alat/Cara Kontrasepsi	2018	2019	2020
Sterilisasi Wanita/Tubektomi/MOW	7.02	16.72	7.53
Sterilisasi Pria/Vasektomi/MOP	0.30	0.20	1.23
IUD/AKDR/Spiral	19.57	31.81	22.07
Suntikan	31.58	29.57	21.89
Susuk KB/Implant	2.60	2.34	3.38
Pil	14.71	12.46	11.25
Kondom Pria/Karet KB	16.24	3.25	1.54
Intravag/Kondom Wanita/Diafragma	0.00	0.00	0.00
Metode Menyusui Alami	3.08	0.70	31.10
Pantang Berkala/Kalender	4.90	2.33	0.00
Lainnya	0.00	0.63	0.00

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

<https://denpasarkota.bps.go.id>

TENAGA KESEHATAN



2.113 Dokter Umum/Spesialis



3.820 Tenaga Keperawatan



DENPASAR
2020



379 Tenaga Kefarmasian



1.890 Tenaga Kebidanan



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DENPASAR

KESEHATAN DAN GIZI

Salah satu yang dapat menunjukkan kualitas SDM adalah indikator di bidang kesehatan. Tingkat kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan mutu pembangunan suatu wilayah. Presiden RI pada suatu kesempatan menyampaikan bahwa bangsa yang maju, bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat, jadi tanpa kesehatan jangan harap negara akan maju. SDM yang sehat akan mampu secara maksimal mendukung proses dan dinamika pembangunan suatu wilayah, khususnya pembangunan ekonominya. Sumber daya manusia (SDM) yang besar jika tidak dibarengi dengan kualitas yang sepadan justru akan menjadi beban pembangunan.

Oleh karena itu, berbagai program terkait peningkatan kesehatan masyarakat terus digalakkan dan disempurnakan. Porsi anggaran kesehatan baik pada APBD maupun APBN pun mengalami peningkatan. Bahkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar minimal 10 persen dari APBN menjadi salah satu fokus APBN. Anggaran ini nantinya akan diarahkan dalam bentuk peningkatan status kesehatan dan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pemberian jaminan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran/PBI). Untuk Kota Denpasar, besaran anggaran kesehatan pada APBD tahun 2021 sekitar 20 persen, angka tersebut sudah di atas amanat undang-undang yang menyatakan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Besarnya porsi anggaran kesehatan jika dimanfaatkan dengan baik tentu akan berdampak pada perbaikan berbagai indikator kesehatan yang ada. Keberhasilan atas berbagai program terkait kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain peningkatan angka harapan hidup (AHH). Berdasarkan komponen pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Indeks Pembangunan Gender (IPG), angka harapan hidup, yang dalam hal ini diukur dari angka harapan hidup saat lahir (E_0) tercatat cenderung meningkat setiap tahun.

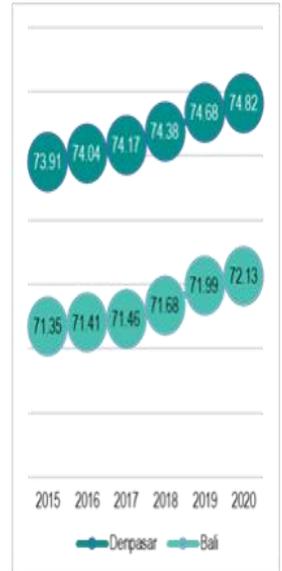
Angka harapan hidup Denpasar pada tahun 2010 berada pada 73 tahun (73,24 tahun). Angka harapan hidup Denpasar terus meningkat hingga di tahun 2020 sudah di atas 74 tahun (74,82 tahun). Jika dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, penduduk perempuan memiliki harapan hidup yang lebih lama. Sejak tahun 2010 angka harapan hidup penduduk perempuan Denpasar sudah di atas 75 tahun yaitu 75,16 tahun di tahun 2010, kemudian menjadi 76,61 tahun di tahun 2020. Sementara angka harapan hidup penduduk laki-laki masih di bawah angka 73 tahun yaitu 71,20 tahun di tahun 2010, kemudian menjadi 72,96 tahun di tahun 2020. Dibandingkan dengan kondisi Bali, AHH Denpasar masih lebih tinggi dibanding angka provinsi.

Penolong Persalinan Pertama

Penolong pertama dalam proses persalinan menjadi kunci pada rendahnya tingkat kematian ibu pasca melahirkan, serta meningkatkan peluang bayi lahir dengan selamat. Salah satu yang bisa dikatakan sebagai faktor penyebab rendahnya tingkat kematian bayi di Denpasar adalah peningkatan kualitas pada proses persalinan.

Sebagian besar proses persalinan di Denpasar dilakukan oleh tenaga medis. Jika ditinjau secara rinci menurut tenaga medis,

Gambar 2.1
Angka Harapan Hidup Kota
Denpasar dan Bali (Tahun),
2015-2020



Sumber: BPS Kota Denpasar

pada tahun 2020 persentase penolong kelahiran sebagian besar ditolong oleh dokter kandungan yaitu mencapai 73,78%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 70,40%. Penolong kelahiran selanjutnya adalah bidan sebesar 22,11%. Kemudian disusul oleh dokter umum 2.84%.

Tabel 2.1 Persentase Persalinan Menurut Penolong Persalinan Terakhir di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Penolong Persalinan Terakhir	2018	2019	2020
Dokter Kandungan	62.57	70.40	73.78
Dokter Umum	3.34	1.48	2.84
Bidan	34.09	28.12	22.11
Lainnya	0.00	0.00	1.26

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi hal yang wajib dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Apalagi jika melihat tingkat kesakitan penduduk Denpasar yang sudah cukup rendah. Tingkat kesakitan atau morbiditas dihitung dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan (sakit) hingga terganggunya aktivitas. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Berdasarkan data Susenas 2020, sekitar tujuh persen penduduk Denpasar mengalami keluhan kesehatan hingga aktivitasnya terganggu. Tingkat morbiditas penduduk Denpasar

cenderung berfluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 tingkat morbiditas penduduk Denpasar sebesar 7.52%, menurun jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 10.97%. Jika dirinci menurut jenis kelamin, tingkat morbiditas penduduk laki-laki cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Tingkat morbiditas penduduk laki-laki sebesar 7.07% pada tahun 2020, sementara penduduk perempuan sebesar 7.99%.

Tabel 2.2 Tingkat Morbiditas Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
Laki-laki	8.65	11.14	7.07
Perempuan	10.82	10.78	7.99
Total	9.71	10.97	7.52

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Meskipun mengalami keluhan kesehatan nampaknya tidak semua penduduk serta merta berobat pada fasilitas kesehatan maupun tempat berobat lainnya. Hal ini terlihat dari persentase jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan berobat jalan yang berkisar di bawah 50 persen. Pada tahun 2019 persentasenya mencapai 56,63%, kemudian menurun menjadi 48,52% di tahun 2020. Kecenderungan untuk berobat jalan tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi penduduk namun juga tidak terlepas dari akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan termasuk ketersediaan jaminan kesehatan yang makin ditingkatkan seperti JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) yang saat ini sudah terintegrasi dengan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Terdapat perbedaan persentase penduduk yang berobat jalan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang berobat jalan lebih rendah dibanding perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang berobat jalan pada

tahun 2020 sebesar 45,88%, sementara penduduk perempuan mencapai 51,23%.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
Laki-laki	49.81	57.16	45.88
Perempuan	53.08	56.08	51.23
Total	51.53	56.63	48.52

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak berobat jalan sebagian besar alasannya adalah karena mengobati sendiri. Secara keseluruhan poporsinya mencapai 50,16%. Sebesar 46,23% merasa tidak perlu mengobati keluhan kesehatannya. Pada tahun 2020 masih terdapat penduduk yang tidak berobat jalan karena alasan tidak memiliki biaya untuk berobat yaitu sebesar 0,31%.

Praktek dokter/bidan menjadi tempat tujuan yang paling umum dari penduduk yang berobat jalan. Di tahun 2020, penduduk yang berobat jalan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan ini mencapai 37,79%. Capaian ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, saat itu fasilitas kesehatan ini dimanfaatkan oleh 46,70% penduduk yang berobat jalan. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya praktek dokter/ bidan yang memfasilitasi program JKN.

Sebagai fasilitas kesehatan pertama, puskesmas juga menjadi pilihan bagi penduduk yang berobat jalan. Di tahun 2020 persentasenya sebesar 8,75% dari penduduk yang berobat jalan. Sementara rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan lanjutan setelah puskesmas, persentase penduduk yang memilih tempat ini untuk berobat jalan mencapai 8,54%.

Meskipun tidak terlalu banyak (kurang dari 5 persen), pengobatan tradisional masih menjadi alternatif pengobatan bagi penduduk Denpasar. Di tahun 2020 persentase penduduk yang berobat jalan dan memilih pengobatan tradisional sebagai tempat berobat sebesar 0,38%. Kecenderungan penduduk laki-laki untuk memanfaatkan pengobatan tradisional sebagai tempat berobat cenderung lebih tinggi dibanding penduduk perempuan.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Tetapi Tidak Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020

Alasan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Tidak Punya Biaya Berobat	0.00	0.57	0.93	0.00	0.47	0.31
Tidak Ada Biaya Transport	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.39
Tidak Ada Sarana Transportasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	0.73	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
Mengobati Sendiri	35.15	51.00	38.61	49.20	36.87	50.16
Tidak Ada Yang Mendampingi	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.25
Merasa Tidak Perlu	64.12	46.30	58.24	46.16	61.19	46.23
Lainnya	0.00	2.13	2.22	3.27	1.11	2.66

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Pilihan tempat berobat antara fasilitas medis dan non medis tidak semata-mata disebabkan oleh faktor preferensi saja, namun juga dari ketersediaan dan penyebaran tenaga medis. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, jumlah puskesmas di Denpasar tahun 2020 sebanyak 11 unit puskesmas dan 25 puskesmas pembantu. Sementara jumlah paramedis masing-masing sebesar 3.820 tenaga keperawatan, 1.890 tenaga kebidanan, dan 379 tenaga kefarmasian. Jumlah dokter yang tersedia di Kota

Denpasar sebesar 2.113 yang mencakup dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi.

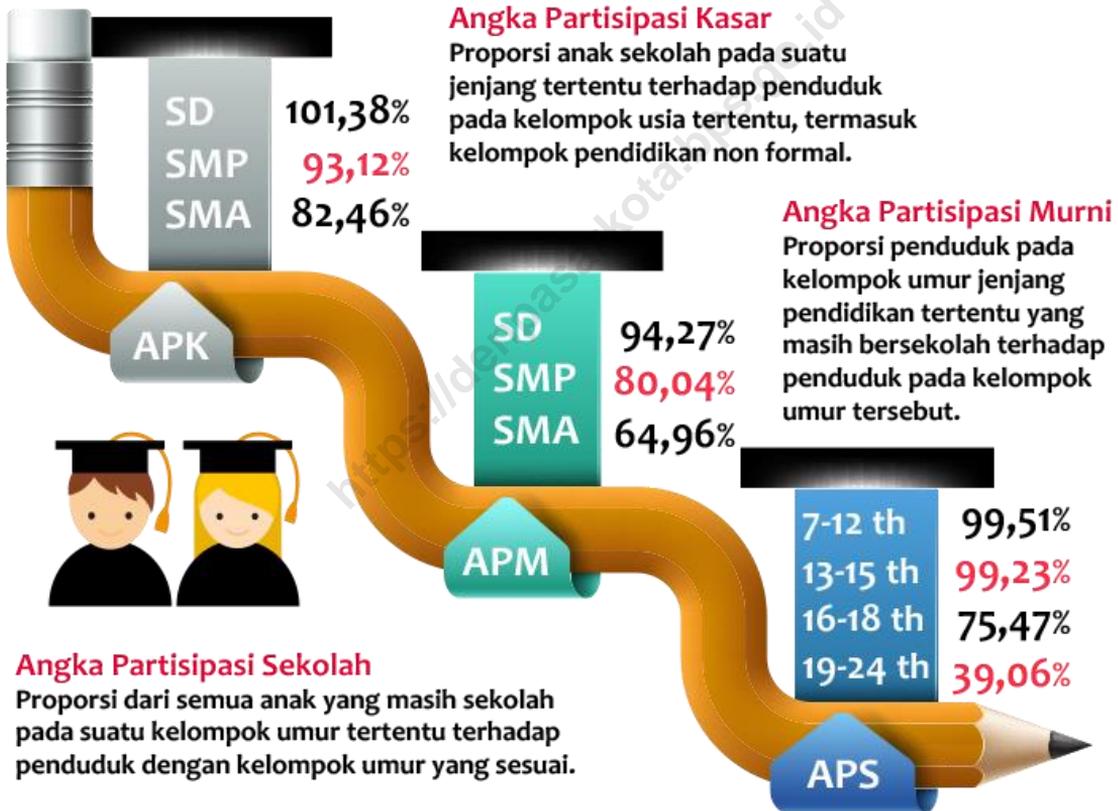
Tabel 2.5 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan dan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020

Tempat Berobat	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
RS Pemerintah	10.68	10.85	6.21	6.41	8.50	8.54
RS Swasta	7.60	22.97	13.56	19.54	10.51	21.18
Praktek Dokter/Bidan	45.72	35.99	47.73	39.45	46.70	37.79
Klinik/Praktek Dokter Bersama	24.50	24.15	18.21	28.64	21.43	26.49
Puskesmas/Pustu	13.07	9.31	17.41	8.24	15.18	8.75
UKBM	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.31
Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif	0.54	0.80	0.00	0.00	0.28	0.38

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar



Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Partisipasi Sekolah Denpasar, 2020



PENDIDIKAN

Angka Melek Huruf (AMH)

Melek huruf adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Menurut definisi UNESCO, melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengomunikasikan, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat menunjukkan perkembangan intelektual suatu wilayah, selain itu angka melek huruf juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Selama periode waktu lima tahun terakhir, secara umum AMH Denpasar cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2016 AMH Denpasar sebesar 98,68%, kemudian meningkat menjadi 99,00% di tahun 2020. Kecenderungan fluktuasi ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Selama rentang waktu lima tahun tersebut, AMH laki-laki berkisar pada angka 99 persen, yaitu dari 99,69% menjadi 99,46%. Sementara itu, AMH penduduk perempuan juga sedikit berfluktuasi dengan tren yang menunjukkan peningkatan, yaitu dari 97,62% menjadi 98,52%.

Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, persentase penduduk yang buta huruf pada usia pendidikan menengah dan universitas (15-24 tahun) sudah nol persen atau sudah melek huruf 100 persen di tahun 2020. Kondisi yang sama terjadi pada seluruh jenis kelamin, baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
15 Tahun ke Atas	99.67	99.46	98.93	98.52	99.31	99.00
15-24 Tahun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) adalah banyaknya tahun belajar yang diselesaikan dalam pendidikan formal dan tidak termasuk tahun yang mengulang. Dalam hal ini, usia penduduk yang diukur adalah penduduk yang berumur 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Kota Denpasar selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah mencapai 11,14 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya rata-rata ini mengalami peningkatan hingga mencapai 11,47 tahun pada tahun 2020.

Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal yang wajar, mengingat tidak semua penduduk perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan layaknya laki-laki. Dalam hal ini, kemungkinan pada rentang usia tersebut, kaum perempuan harus menikah dan mengurus rumah tangga, sehingga tidak sempat lagi melanjutkan pendidikan. Namun demikian, dari tahun ke tahun rata-rata lama sekolah perempuan cenderung mengalami tren peningkatan. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki pada tahun 2020 tercatat sebesar 11,87 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk perempuan hanya mencapai 11,13 tahun.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, meningkatnya tingkat pendidikan penduduk dapat menjadi gambaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Tingkat pendidikan dapat dilihat dari ijazah terakhir yang dimiliki. Setengah lebih penduduk berumur 15 tahun ke atas telah berijazah setingkat SMA ke atas. Pada tahun 2020 persentasenya mencapai 65,73%. Meskipun demikian, persentase penduduk yang berpendidikan setingkat SD masih cukup tinggi, dengan persentase mencapai 12,84% pada tahun 2019 dan 12,87% pada tahun 2020. Sementara persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sudah cukup rendah yaitu hanya sebesar 3,42 persen di tahun 2020.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020

Ijazah Yang Dimiliki	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Tidak Mempunyai Ijazah	4.48	2.81	6.55	4.06	5.49	3.42
SD Sederajat	10.46	10.29	15.32	15.57	12.84	12.87
SMP Sederajat	20.32	17.19	20.41	18.79	20.36	17.97
SMA Sederajat	45.49	45.79	37.36	38.68	41.51	42.32
DI/DII/DIII	5.43	7.29	4.85	6.36	5.14	6.83
Diploma IV/S1/S2/S3	13.82	16.63	15.52	16.53	14.65	16.58

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Jika dilihat menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk laki-laki yang tidak memiliki ijazah lebih rendah dibanding penduduk

perempuan. Penduduk laki-laki yang tidak memiliki ijazah hanya sebesar 2,81%. Demikian halnya jika dilihat lebih jauh menurut jenjang pendidikan. Meskipun persentase penduduk perempuan dengan ijazah setingkat SD dan SMP masih lebih tinggi dari laki-laki, namun pada tingkat SMA dan Diploma IV/S1/S2/S3 persentase laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Pada tingkat pendidikan Diploma ke atas, persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah pada tingkat pendidikan ini mencapai 23,92%. Sementara persentase untuk perempuan sebesar 22,89%.

Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan beberapa indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sudut pandang berbeda juga dapat diartikan sebagai kemampuan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Berdasarkan data tahun 2020, APS Kota Denpasar untuk penduduk usia 7-12 tahun mencapai 99,51%. Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk perempuan (100%) tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki (99,10%). Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia tersebut telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Sementara pada kelompok usia lainnya, APS berangsur menurun. Secara umum, sebagian besar penduduk usia sekolah sudah dapat menikmati fasilitas pendidikan.

APS penduduk perempuan (100%) juga terlihat lebih tinggi dibandingkan laki-laki (98,48%) pada kelompok umur 13-15 tahun. Sementara pada jenjang kelompok umur lainnya, APS penduduk perempuan tercatat lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada kelompok umur 16-18 tahun, APS penduduk perempuan hanya sebesar 68,92%, sedangkan APS penduduk laki-laki mencapai angka 83,29%.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
7-12 tahun	100.00	99.10	100.00	100.00	100.00	99.51
13-15 tahun	100.00	98.48	96.61	100.00	98.42	99.23
16-18 tahun	73.37	83.29	74.10	68.92	73.74	75.47

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Jika pada APS tidak memperhatikan jenjang pendidikan sesuai kelompok umur, maka pada APM jenjang pendidikan sesuai kelompok umur digunakan sebagai dasar penghitungan. Dengan cara penghitungan tersebut, maka APM dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dan juga proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya.

Sejalan dengan APS, angka APM juga menunjukkan perkembangan yang hampir sama selama lima tahun terakhir. Pada masing-masing jenjang pendidikan, nilai APM menunjukkan tren berfluktuatif cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Selain itu, pola yang sama juga terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, yang memperlihatkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka besaran APM semakin rendah juga masih terjadi.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar (Persen), 2019-2020

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
SD Sederajat	94.35	95.26	94.64	93.10	94.50	94.27
SMP Sederajat	76.38	79.14	77.59	80.97	76.94	80.04
SMA Sederajat	64.74	69.12	64.10	61.48	64.42	64.96

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum APM penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan pada hampir seluruh jenjang pendidikan kecuali jenjang SMP. Pada jenjang pendidikan SD, APM penduduk laki-laki mencapai 95,26%, sementara APM penduduk perempuan sebesar 93,10%. Kemudian pada jenjang pendidikan SMP, APM penduduk laki-laki sebesar 79,14%, sedangkan APM penduduk perempuan mencapai 80,97%. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMA, APM penduduk laki-laki mencapai 69,12%, sedangkan APM penduduk perempuan sebesar 61,48%.

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan, salah satu indikator yang digunakan adalah rasio antara jumlah murid dengan guru. Semakin kecil nilai rasio ini, menandakan bahwa semakin memadainya pelayanan pendidikan dari sisi rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat merata atau tidaknya jumlah tenaga pengajar pada suatu daerah.

Rasio murid guru di tingkat SD sederajat pada tahun ajaran 2017/2018 adalah seorang guru rata-rata mengajar sebanyak 23 orang siswa. Rasio ini mengalami penurunan hingga pada tahun ajaran 2019/2020 menjadi sebesar 19 orang siswa. Demikian juga pada jenjang pendidikan SMP sederajat, rasio murid gurunya mengalami penurunan selama periode tersebut. Dari sebesar 22 orang siswa pada tahun ajaran 2017/2018 menjadi sebesar 20 orang siswa pada tahun ajaran 2019/2020.

Sementara pada jenjang pendidikan SMA sederajat juga terjadi penurunan rasio murid guru selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Rasio murid guru di jenjang ini pada tahun ajaran 2017/2018 berada pada angka 20 orang siswa, lalu pada tahun ajaran 2019/2020 mengalami penurunan menjadi sebanyak 18

orang siswa. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan di Kota Denpasar.

Tabel 3.5 Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, Tahun Ajaran 2017/2018-2019/2020

Tahun Ajaran	Rasio Murid Guru		
	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat
2017/2018	22.69	21.89	19.57
2018/2019	19.70	20.72	17.77
2019/2020	18.97	19.83	17.89

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar

• Male Vs Female 2020



TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DENPASAR

KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, namun tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tabel 4.1 TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Jenis Kelamin	TPAK			TPT		
	2018*	2019*	2020	2018*	2019*	2020
Laki-laki	82.94	83.02	78.91	2.57	2.44	8.64
Perempuan	63.68	59.88	62.55	0.91	2.08	6.28
Laki-laki + Perempuan	73.52	71.70	70.91	1.87	2.29	7.62

*Angka *backcasting* dengan penimbang proyeksi berbasis SUPAS 2015

Sumber: Sakernas, BPS Kota Denpasar

TPAK Denpasar selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018 TPAK Denpasar sebesar 73,52%, yang memiliki arti bahwa sebanyak 73,52% dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) aktif secara ekonomi atau tersedia untuk kegiatan produksi. Sementara sisanya bukan merupakan angkatan kerja, yang dalam hal ini bisa jadi masih

bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya. Memasuki tahun 2020, TPAK Denpasar menurun menjadi sebesar 70,91%, kemudian pada tahun 2021 TPAK menurun kembali menjadi sebesar 68,67%.

Berdasarkan jenis kelamin, selama periode tahun 2018 hingga tahun 2020, TPAK laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki selama periode tersebut berada pada kisaran 78-83 persen, sedangkan TPAK penduduk perempuan berada jauh dibawahnya, yaitu berkisar 59-64 persen. Lebih rendahnya TPAK perempuan ini dinilai wajar, mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga, apalagi setelah menikah kebanyakan perempuan akan mengurus rumah tangga. Selain itu, jika dilihat tren selama tiga tahun terakhir, TPAK perempuan cenderung mengalami penurunan meskipun masih relatif rendah.

Dari TPAK kita dapat mengetahui gambaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Namun untuk melihat seberapa banyak angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh lapangan usaha yang tersedia, dapat dilihat melalui indikator TPT. Angka TPT Denpasar selama kurun waktu tahun 2018-2020 cenderung meningkat. TPT Denpasar pada tahun 2018 sebesar 1,87%, kemudian naik signifikan menjadi 7,62% pada tahun 2020. Selanjutnya sedikit menurun menjadi sebesar 7,02% pada tahun 2021. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT penduduk laki-laki memiliki persentase yang cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT penduduk perempuan. TPT laki-laki selama kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 2 sampai 9 persen, sedangkan TPT penduduk perempuan berkisar 1 hingga 6 persen.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Dari indikator ini, kita dapat melihat persebaran penyerapan tenaga kerja, selain itu dapat dilihat juga kemampuan daya serap terhadap pada masing-masing lapangan usaha. Lapangan usaha

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta lapangan usaha Industri Pengolahan.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Lapangan Usaha	2018*	2019*	2020
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.20	1.90	2.29
B. Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.10	0.06
C. Industri Pengolahan	12.85	11.50	13.53
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.36	0.20	0.24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.30	1.24	0.45
F. Konstruksi	6.26	5.32	5.04
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	28.05	25.81	24.97
H. Transportasi dan Pergudangan	4.24	5.54	4.94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.69	16.45	13.85
J. Informasi dan Komunikasi	0.46	1.10	0.99
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.60	4.01	4.38
L. Real Estat	0.22	0.17	0.28
M,N. Jasa Perusahaan	5.18	4.61	4.23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.18	5.57	6.08
P. Jasa Pendidikan	5.33	4.94	4.85
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.94	2.85	3.73
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6.15	8.71	10.06

*Angka *backcasting* dengan penimbang proyeksi berbasis SUPAS 2015

Sumber: Sakernas, BPS Kota Denpasar

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor mampu menyerap tenaga kerja sebesar 24,97%. Sebanyak 13,85% tenaga kerja mampu diserap lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Lapangan usaha Industri Pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 13,53%. Sementara lapangan usaha lainnya hanya mampu menyerap tenaga kerja di bawah 11%.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Status Pekerjaan	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	2018*	2019*	2020	2018*	2019*	2020	2018*	2019*	2020
Berusaha Sendiri	10.45	21.48	18.50	14.85	17.00	20.64	12.33	19.65	19.43
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	4.81	5.63	7.06	8.46	8.50	9.10	6.37	6.81	7.95
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Tak Dibayar	9.59	5.47	4.02	4.41	2.28	1.41	7.38	4.16	2.88
Buruh/Karyawan/Pegawai	72.31	63.30	62.08	61.46	61.30	55.21	67.67	62.48	59.07
Pekerja Bebas	0.62	2.11	3.77	1.15	1.70	1.72	0.85	1.94	2.87
Pekerja Keluarga	2.20	2.01	4.57	9.68	9.22	11.92	5.40	4.96	7.79

*Angka *backcasting* dengan penimbang proyeksi berbasis SUPAS 2015

Sumber: Sakemas, BPS Kota Denpasar

Selanjutnya jika ditinjau menurut status pekerjaan, secara umum pilihan masyarakat untuk menjadi buruh/karyawan masih memiliki persentase tertinggi, yaitu sekitar 59-68 persen selama kurun waktu tahun 2018-2020. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu dominan sebagai buruh/karyawan. Pilihan kedua yang terbanyak adalah berusaha sendiri, yang persentasenya berkisar antara 12-20 persen dalam periode tiga tahun terakhir.

Diantara semua pilihan status pekerjaan tersebut, yang menarik adalah pilihan untuk menjadi pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga. Dibandingkan penduduk laki-laki, kaum perempuan yang bekerja sebagai status ini jauh lebih banyak. Secara rata-rata jumlahnya mencapai hampir tiga kali lipat pekerja laki-laki. Kemungkinan besar, pilihan ini dipilih karena cenderung lebih fleksibel dan tidak terikat jam kerja sehingga pekerja perempuan jauh lebih banyak yang termasuk pada status ini.

Jumlah Jam Kerja

Berdasarkan jam kerja, penduduk bekerja dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yakni sementara tidak bekerja, setengah pengangguran, dan pekerja penuh. Yang dimaksud sementara tidak bekerja adalah pekerja yang memiliki pekerjaan, namun selama seminggu terakhir sedang tidak bekerja. Sementara yang dikategorikan sebagai setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu, namun memiliki jumlah jam kerja kurang dari 35 jam. Kemudian yang dimaksud pekerja penuh adalah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu dan memiliki jumlah jam kerja 35 jam atau lebih.

Sama seperti kondisi dua tahun sebelumnya, jumlah pekerja penuh pada tahun 2020 merupakan yang tertinggi hingga mencapai 63,23%. Di sisi lain, jumlah penduduk yang sementara tidak bekerja menjadi yang terendah yaitu hanya sebesar 4,09%. Sisanya adalah setengah pengangguran sebesar 32,68%. Persentase setengah pengangguran meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, komposisi penduduk laki-laki yang bekerja penuh jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Selama periode tersebut, pekerja penuh penduduk laki-laki berkisar 64-91 persen, sedangkan pekerja perempuan hanya berkisar 63-80 persen.

Pada setengah pengangguran menurut jenis kelamin, pekerja perempuan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki. Perbedaan yang sangat mencolok terjadi pada tahun 2018 dan 2019, keberadaan jumlah setengah pengangguran perempuan jumlahnya mencapai 2 kali lipat setengah pengangguran laki-laki. Tingginya komposisi setengah pengangguran perempuan ini kemungkinan besar terkait dengan kurang fleksibelnya jam kerja pekerja perempuan, sehingga lebih memilih pekerjaan yang tidak terikat jam kerja.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Lapangan Usaha	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sementara Tidak Bekerja	1.18	1.26	5.43	3.07	1.83	2.36	1.99	1.50	4.09
Setengah Pengangguran	8.07	9.31	30.81	16.78	17.70	35.09	11.80	12.75	32.68
Pekerja Penuh	90.75	89.43	63.75	80.16	80.47	62.55	86.21	85.76	63.23

Sumber: Sakernas, BPS Kota Denpasar

<https://denpasarkota.bps.go.id>

RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN DENPASAR



TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi adalah susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan pola konsumsi disebabkan oleh pendapatan; tingkat pendidikan/pengetahuan; kondisi tempat tinggal; jenis pekerjaan; tingkat peradaban bangsa; kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat; tinggi rendahnya harga barang dan jasa; serta selera yang sedang berkembang di masyarakat. Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Dengan menggunakan data pengeluaran dapat diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga meliputi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dalam periode tahun 2016-2020, pengeluaran rumah tangga di Denpasar tidak mengalami pergeseran pola pengeluaran, yaitu pengeluaran bukan makanan masih lebih besar dari pengeluaran makanan. Meskipun pola pengeluaran masih sama, tetapi proporsinya berfluktuasi setiap tahun.

Pada tahun 2020, secara umum tingkat konsumsi yang tergambar dalam konsumsi per kapita penduduk mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi per kapita terjadi pada konsumsi makanan maupun bukan makanan. Jika dilihat dari komposisinya, pengeluaran/konsumsi makanan maupun bukan makanan menunjukkan tren berfluktuasi.

Jika di tahun 2019 komposisi pengeluaran makanan mempunyai porsi sebesar 38,69% terhadap total pengeluaran, namun pada tahun 2020 proporsinya naik menjadi sebesar 39,76% dari total pengeluaran. Sebaliknya, proporsi pengeluaran bukan makanan cenderung berfluktuasi setiap tahun. Meskipun persentasenya sedikit berfluktuasi, tetapi proporsi pengeluaran bukan makanan cenderung lebih besar dibandingkan pengeluaran makanan selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Denpasar, 2019-2020

Jenis Pengeluaran	Nominal (000 Rp)		Proporsi (Persen)	
	2019	2020	2019	2020
Makanan	773 883	893 654	38.69	39.76
Bukan Makanan	1 226 376	1 354 068	61.31	60.24
Jumlah	2 000 258	2 247 722	100.00	100.00

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Pendapatan Rumah Tangga

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional. Ketimpangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan 40 persen terbawah terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut:

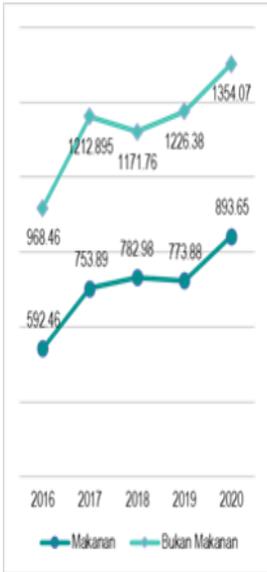
- memperoleh <12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan

Gambar 5.1
Persentase Pengeluaran Per Kapita Kota Denpasar Menurut Jenis Pengeluaran (Persen), 2016-2020



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Gambar 5.2
Pengeluaran Per Kapita
Kota Denpasar Menurut Jenis
Pengeluaran (Ribu Rupiah),
2016-2020



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

pendapatan dianggap sedang,

- c. memperoleh >17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan ulasan ini menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Mengacu pada kriteria Bank Dunia di atas, ketimpangan pendapatan penduduk di Denpasar tahun 2020 dapat dikatakan rendah (*low inequality*). Porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen pendapatan terbawah mencapai 19,26%. Angka ini menunjukkan adanya penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini terlihat dari distribusi pendapatan yang dinikmati penduduk terbawah yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Porsi pengeluaran 40 persen kelompok terbawah ini mampu mencapai angka 19,76% di tahun 2016. Selanjutnya berfluktuatif pada rentang 18-19 persen.

Tabel 5.2 Distribusi Pendapatan Kota Denpasar, 2016-2020

Distribusi Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020
40 Persen Rendah	19.76	19.23	19.17	18.25	19.26
40 Persen Sedang	38.99	39.29	39.39	40.56	40.21
20 Persen Tinggi	41.25	41.48	41.44	41.19	40.53

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

PERUMAHAN DENPASAR



54,55%
Rumah Kontrak/Sewa



99,75%
Atap Layak



91,09%
Lantai Bukan Tanah



99,79%
Dinding Permanen



99,90%
Listrik Dari PLN



99,25%
Air Minum Layak



99,40%
Kloset Leher Angsa

Sumber: BPS Kota Denpasar



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Perumahan diartikan sebagai sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal. Adapun rumah sendiri dapat diartikan sebagai salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah atau yang dikenal istilahnya dengan papan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan.

Dewasa ini, rumah menjadi salah satu jati diri pemiliknya. Tak hanya menjadi tempat tinggal sesuai fungsinya, rumah dijadikan sebagai *lifestyle*. Denpasar sendiri merupakan daerah dengan harga rumah atau properti yang cukup tinggi. Mengingat wilayah Denpasar cukup kecil dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain di Bali.

Menurut Depkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat, yaitu: pertama, dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain *privacy* yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga, dan penghuni rumah. Ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas *vector* penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan

minuman dari pencemaran. Keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah.

Definisi rumah sehat lainnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 162 dan 163 yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada pasal 163 ayat 2 mengamanatkan bahwa lingkungan sehat antara lain mencakup lingkungan permukiman. Salah satu upaya mewujudkan lingkungan sehat dengan peningkatan rumah sehat. Rumah sehat sendiri merupakan rumah yang memenuhi kriteria minimal: akses air minum, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan (Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Permenkes Nomor 1077/PER/V/MENKES/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah).

Selain sehat, sebuah rumah juga harus layak huni. Salah satu konsep rumah layak huni yang digunakan adalah konsep dari Kementerian Perumahan Rakyat. Variabel yang dilihat antara lain kualitas dari jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah. (Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota). Dalam publikasi ini akan dibahas mengenai karakteristik rumah berdasarkan kualitas, fasilitas, dan status kepemilikannya.

Kualitas Rumah Tinggal

Kualitas rumah tinggal yang baik akan membuat penghuninya merasa aman, terlindung, dan terjamin kesehatannya. Ada beberapa indikator yang menunjukkan kualitas rumah tinggal yakni rumah dengan lantai bukan tanah, rumah dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes, serta dinding yang terbuat dari

tembok atau kayu.

Salah satu indikator yang menentukan kualitas rumah yang baik adalah dilihat dari lantainya. BPS sendiri mengklasifikasikan lantai menjadi beberapa kategori yakni lantai marmer, keramik, ubin/tegel/teraso, kayu/papan kualitas tinggi, semen/bata merah, bambu, kayu/papan kualitas rendah, dan tanah.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Jenis Lantai Terluas	2018	2019	2020
Marmer/Granit	2.92	2.23	3.60
Keramik	84.17	84.36	87.49
Parket/Vinil/Karpet	0.07	0.00	0.22
Ubin/Tegel/Teraso	1.84	1.67	1.85
Kayu/Papan	0.14	0.00	0.28
Semen/Bata Merah	9.69	10.56	6.35
Tanah	1.17	1.18	0.22

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan lantai tanah tercatat sebesar 0,22%. Sedikit menurun dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yang sebesar 1,18%. Terlihat bahwa sebagian besar rumah penduduk Denpasar sudah menggunakan lantai keramik dan semen yakni masing-masing sebesar 87,49% dan 6,35%. Dari gambaran ini kiranya dapat dikatakan kualitas perumahan dari sisi lantai yang digunakan sudah cukup baik.

Selain lantai, atap rumah pun mempengaruhi kualitas rumah. Atap yang baik memiliki klasifikasi atap yang mampu melindungi rumah dari perubahan cuaca baik panas, hujan, petir, angin, debu, dan sebagainya. Atap yang layak adalah atap yang terbuat dari beton, genteng, sirap, seng, dan asbes.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Jenis Atap Terluas	2018	2019	2020
Beton	2.37	2.89	3.61
Genteng	75.90	76.92	77.64
Asbes	18.59	16.43	14.31
Seng	3.13	3.77	4.20
Bambu/Rumbia/Lainnya	0.00	0.00	0.23

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Dilihat dari sisi atap yang digunakan, kondisi perumahan di Denpasar dapat dikatakan telah memenuhi standar layak. Pada tahun 2020, 99,77% rumah di Denpasar sudah menggunakan atap yang dianggap layak yakni yang terbuat dari beton, genteng, sirap, seng, dan asbes. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Jenis Dinding Terluas	2018	2019	2020
Tembok	96.21	97.35	99.28
Plesteran Anyaman Bambu	0.00	0.50	0.33
Kayu/Papan	2.77	1.54	0.22
Anyaman Bambu	0.54	0.60	0.17
Bambu/Lainnya	0.47	0.00	0.00

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Dinding rumah merupakan salah satu elemen yang penting pada suatu bangunan rumah. Dinding yang kokoh dapat melindungi penghuninya dari ancaman gempa maupun penyakit. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga di Denpasar yang menggunakan dinding tembok pada rumahnya adalah sebesar 99,28%. Sisanya

masih berdinginkan plesteran anyaman bambu, kayu/papan, dan anyaman bambu masing-masing sebesar 0,33%, 0,22%, dan 0,17%.

Selanjutnya kualitas rumah juga diukur dari rata-rata luas lantai per kapita. Luas lantai per kapita sendiri dapat diartikan sebagai luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya.

Dari sisi luas lantai per kapita, sebagian besar rumah tangga memiliki luas lantai per kapita di atas 10m², artinya secara rata-rata setiap anggota rumah tangga mempunyai ruang lebih dari 10m². Dari sisi persentase mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 lalu. Persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita lebih dari 10m² pada tahun 2019 sebesar 61,24%. Sementara pada tahun 2020 persentasenya tercatat naik hingga menjadi sebesar 66,17%.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Luas Lantai Per	2018	2019	2020
≤ 7.2	22.79	24.78	21.07
7.3 - 9.9	12.69	13.98	12.76
≥ 10	64.52	61.24	66.17

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Di sisi lain, persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita 7,3-9,9m² menurun dari 13,98% pada tahun 2019 menjadi 12,76% pada tahun 2020. Begitu pula dengan persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2m², angkanya menurun dari 24,78% di tahun 2019 menjadi sebesar 21,07% di tahun 2020.

Fasilitas Rumah Tinggal

Selain kondisi fisik rumah (atap, lantai, dinding), fasilitas rumah tinggal yang baik sudah tentu akan menambah kenyamanan dan kemudahan dalam beraktifitas serta meningkatkan derajat kesehatan penghuninya. Fasilitas rumah tangga terkait dengan ketersediaan air bersih untuk minum, ketersediaan jamban, dan listrik untuk penerangan rumah tangga.

Indikator pertama yang digunakan untuk melihat fasilitas rumah tinggal yang baik adalah akses rumah tangga terhadap sumber air minum. Air minum bersih didefinisikan sebagai air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) > 10 m.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum bersih di tahun 2020 adalah sebesar 99,08%. Persentase ini sedikit meningkat dibandingkan kondisi tahun 2019 yang sebesar 98,54%. Berbeda halnya dengan akses terhadap air minum bersih, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada tahun 2020 sebesar 99,25%, turun jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 100%.

Jarak sumber air minum (sumur atau pompa) dengan pembuangan tinja idealnya di atas 10 meter. Namun hal ini kiranya sulit dipenuhi mengingat kondisi perumahan sekarang semakin sempit dan berdekatan. Meskipun demikian persentase rumah tangga dengan jarak sumber air minum di atas 10 meter dari pembuangan tinja naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang memenuhi kriteria ini sebesar 63,69%. Sementara pada tahun 2020 persentasenya naik hingga mencapai 70,16%.

Dari sisi sumber air minum yang dikonsumsi, sebagian besar rumah tangga menggunakan air minum kemasan/isi ulang. Persentasenya mencapai 95,91% pada tahun 2020. Hal ini berarti kualitas air minum sudah cukup baik dengan asumsi kualitas air

minum yang diperdagangkan lebih baik. Namun pada kondisi tertentu hal tersebut menunjukkan keterbatasan akses bagi penduduk dengan pendapatan rendah. Dalam artian penduduk dengan pendapatan rendah memiliki keterbatasan pendapatan untuk pengeluaran air minum kemasan/isi ulang.

Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Fasilitas Perumahan	2018	2019	2020
Akses Air Minum Bersih	98.55	98.54	99.08
Akses Air Minum Layak	98.85	100.00	99.25
Jarak Sumber Air Minum Dengan Pembuangan Tinja > 10 Meter	76.30	63.69	70.16
Air Minum Kemasan Merk/Isi Ulang	90.43	93.98	95.91
Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	86.86	86.07	87.84
Jenis Jamban/Kloset Leher Angsa	98.39	100.00	99.40
Pembuangan Akhir Menggunakan Tangki Septik/IPAL	99.41	100.00	99.63
Sumber Penerangan Listrik	99.77	100.00	99.46
Bahan Bakar Memasak Menggunakan Listrik/Gas	87.82	90.90	89.77

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Indikator selanjutnya yang bermanfaat untuk mengukur kelayakan sanitasi adalah kepemilikan jamban. Persentase rumah tangga di Denpasar yang sudah memiliki jamban sendiri pada tahun 2020 sebesar 87,84%, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2019 yang sebesar 86,07%. Jamban yang memenuhi syarat kesehatan merupakan jamban yang pembuangan terakhirnya menggunakan leher angsa/tangki septik. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan leher angsa sebesar 99,40%. Sementara yang pembuangan terakhirnya menggunakan tangki septik/lpal sebesar 99,63%.

Fasilitas rumah lainnya adalah ada atau tidaknya sumber penerangan di rumah tangga. Secara umum, seluruh rumah tangga di Denpasar menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang teraliri listrik mencapai angka 99,46%.

Jenis bahan bakar yang sering digunakan untuk memasak kiranya dapat menjadi indikator kualitas dari fasilitas perumahan. Apalagi belakangan ini program alih energi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas gencar dilakukan. Bahan bakar gas dinilai lebih rendah polusi dan lebih hemat energi. Sebagian besar rumah tangga di Denpasar sudah menggunakan bahan bakar listrik/gas untuk keperluan memasak. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 89,77%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 90,90%.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati karena dengan indikator ini dapat diperoleh gambaran tentang kemampuan penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu tersedianya rumah layak huni. BPS sendiri mengklasifikasikan status kepemilikan rumah menjadi beberapa kategori yakni milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, dan lainnya.

Pada tahun 2020, proporsi rumah tangga dengan status rumah milik sendiri di Kota Denpasar hanya sebesar 38,53%. Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri naik dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 37,64%. Sebaliknya, rumah tangga yang menempati rumah kontrak atau sewa tercatat menurun menjadi sebesar 54,55% pada tahun 2020, setelah sebelumnya mencapai 57,29% di tahun 2019.

Kenaikan persentase kepemilikan rumah milik sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya diduga karena

menurunnya harga rumah atau properti yang ada di Denpasar pada saat pandemi covid-19. Meskipun demikian, harga rumah di wilayah perkotaan masih cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Pada kondisi ini menyewa rumah tentu menjadi pilihan alternatif bagi penduduk di wilayah perkotaan.

Tabel 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Status Kepemilikan Rumah	2018	2019	2020
Milik Sendiri	38.50	37.64	38.53
Kontrak/Sewa	53.59	57.29	54.55
Bebas Sewa	7.50	4.71	6.91
Dinas	0.40	0.36	0.00

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

KEMISKINAN DENPASAR

2021

Garis
Kemiskinan
(per kapita per bulan)
Rp662.499

Penjumlahan garis
kemiskinan makanan
dan non makanan

P1 Indeks
Kedalaman
Kemiskinan
0,37

Rata-rata
kesenjangan
pengeluaran
masing-masing
penduduk miskin
terhadap garis
kemiskinan

Jumlah Penduduk
Miskin (ribu jiwa)
29,41

Penduduk
yang memiliki
rata-rata
pengeluaran
per kapita
per bulan di
bawah garis
kemiskinan

Persentase
Penduduk Miskin
2,96%

NAIK 0,82 poin
dibandingkan
tahun 2020

Persentase penduduk
yang berada di bawah
Garis Kemiskinan

P2 Indeks
Keparahan
Kemiskinan
0,06

Gambaran mengenai penyebaran
pengeluaran di antara penduduk
miskin



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DENPASAR

KEMISKINAN

Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah bersangkutan. Namun terkadang pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bahkan tetap menyisakan kemiskinan bagi sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor-faktor produksi yang tersedia, maupun hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu proses pembangunan ekonomi tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang terjadi, metode yang biasa digunakan adalah metode *Head Count Index*. Menurut metode ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan. Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, maka terlebih dahulu harus dihitung garis kemiskinannya.

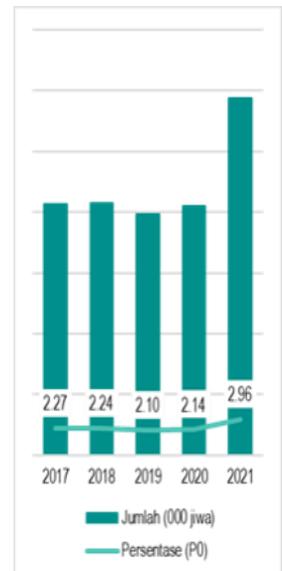
Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan

(perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya). Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kilokalori per hari (hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978).

Agar seseorang dapat dikatakan hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu juga dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas kebutuhan minimum untuk makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang disebut Garis Kemiskinan. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan dan jika pengeluarannya di bawah garis tersebut, maka yang bersangkutan akan dikategorikan miskin.

Berdasarkan hasil pendataan Susenas Maret 2021, Garis Kemiskinan (GK) Denpasar mencapai Rp662.499 per kapita per bulan. Kondisi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan Maret 2020 yang sebesar Rp618.064 per kapita per bulan. Sementara itu, kemiskinan Denpasar tercatat sebesar 2,96% pada tahun 2021. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,14%.

Gambar 7.1
Jumlah dan Persentase
Penduduk Miskin Kota
Denpasar, 2017-2021



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Tabel 7.1 Indikator Kemiskinan Denpasar, 2019-2021

Indikator Kemiskinan	Maret 2019	Maret 2020	Maret 2021
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	571 246	618 064	662 499
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	19.83	20.48	29.41
Persentase Penduduk Miskin (P ₀)	2.10	2.14	2.96
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	0.29	0.25	0.37
Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)	0.06	0.05	0.06

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021, tren angka kemiskinan Denpasar cenderung berfluktuasi meningkat. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kota Denpasar sebesar 2,27%. Selanjutnya sempat menurun pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebesar 2,24% dan 2,10%. Kemudian sedikit naik pada tahun 2020 menjadi 2,14%. Lalu pada tahun 2021 kembali naik sebesar 2,96%.

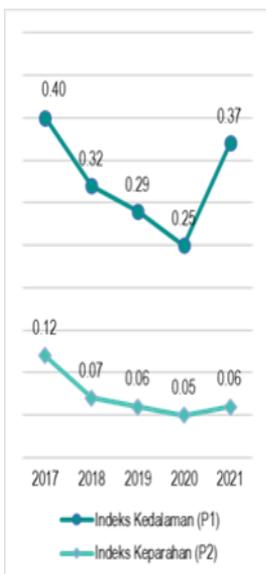
Sejalan dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar juga menunjukkan tren berfluktuasi meningkat. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin Denpasar tercatat mencapai 29,41 ribu jiwa. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 20,48 ribu jiwa.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Selain garis kemiskinan, indeks yang digunakan untuk melihat indikator lain dari kemiskinan yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman mengandung arti sejauh mana rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gaps Index* (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan.

Sementara itu, untuk melihat masalah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin digunakan ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P_2). Indeks ini secara sederhana merupakan jumlah dari *poverty gap* tertimbang yang penimbangnya sebanding dengan *poverty gap* itu sendiri. Dengan mengkuadratkan *poverty gap*, indeks ini secara implisit memberikan penimbang yang lebih pada unit observasi yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 7.2
Indeks Kedalaman dan
Keparahan Kemiskinan Kota
Denpasar, 2017-2021



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Indeks kedalaman Denpasar sebesar 0,25 pada tahun 2019, nilai tersebut naik menjadi 0,37 pada kondisi tahun 2020. Hal ini mengindikasikan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan (GK). Meningkatnya GK yang diikuti oleh semakin tingginya nilai dari P_1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang setiap tahunnya yang secara langsung berarti semakin sedikit jumlah uang yang dibelanjakan oleh mereka.

Di sisi lain, indeks keparahan Denpasar juga berfluktuasi sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019, nilai P_2 sebesar 0,06 dan pada tahun 2020 nilainya turun menjadi 0,05. Kemudian kembali naik menjadi 0,06 pada tahun 2021. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antara penduduk miskin juga semakin tinggi. Dengan kata lain sebaran penduduk miskin lebih heterogen dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau ruang lingkup kondisi pengeluaran lebih lebar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

<https://denpasar.go.id>

<https://denpasarkota.bps.go.id>



RUMAH TANGGA YANG MENERIMA JAMINAN SOSIAL 2020

01



5,36%
Asuransi
Kecelakaan
Kerja



6,03%
Jaminan
Pensiun/
Veteran

02



0,66%
Pesangon
PHK



3,36%
Jaminan
Hari Tua

03

3,49%
Jaminan/
Asuransi
Kematian



04

05



SOSIAL LAINNYA

Selain tujuh aspek yang menunjukkan kesejahteraan rumah tangga di Denpasar, ada aspek sosial lainnya yang juga mampu menunjukkan hal yang sama, antara lain: akses terhadap bantuan sosial seperti beras miskin (Raskin) dan kredit usaha; jenis kepemilikan aset di rumah tangga; serta tindak kejahatan.

Akses Terhadap Bantuan Sosial

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui diluncurkannya berbagai program-program perlindungan sosial. Terdapat beberapa jenis program perlindungan sosial yang ditujukan untuk rumah tangga miskin antara lain penyaluran Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Jaminan Sosial lainnya.

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga Yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Ya, Dapat Menunjukkan Kartu	0,21	0.73	0.86
Ya, Tidak Dapat Menunjukkan Kartu	0,85	1.69	0.83

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tadinya dikenal sebagai Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Masyarakat akan menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang penyalurannya dilakukan secara non tunai melalui KKS.

Dengan KKS, penerima PKH juga belajar mengenal produk-produk perbankan. Mulai dari menabung hingga membuka akses mereka terhadap beragam bantuan untuk memulai usaha. KKS mempunyai fungsi ganda yaitu menjadi tabungan dan dompet (*e-wallet*). Pada tahun 2020, sekitar 1,69 persen rumah tangga menerima KPS/KKS, menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 2,42 persen.

Selain KPS/KKS, kredit usaha juga diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya membantu permodalan masyarakat dalam melakukan usaha. Melalui program ini diharapkan dapat membantu usaha/industri rumah tangga untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Salah satu program kredit usaha yang sedang digulirkan bagi masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Dengan bunga yang ringan dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membuka atau meningkatkan usahanya.

Berbeda dengan KPS/KKS, persentase rumah tangga di Kota Denpasar yang menerima kredit usaha mengalami penurunan pada tahun 2020. Jika pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha mencapai 30,98 persen, namun pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 28,14 persen.

Jika dirinci berdasarkan jenis kredit usaha yang diterima rumah tangga pada tahun 2020, mayoritas penduduk Denpasar menerima kredit usaha dari Koperasi hingga mencapai 26,33 persen. Selanjutnya diikuti oleh program KUR dan kredit usaha dari perusahaan *leasing* masing-masing sebesar 21,77 persen dan 20,76 persen. Rumah tangga yang menerima kredit dari Bank umum selain KUR juga cukup banyak yaitu sebesar 19,71 persen.

Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Jenis Kredit Usaha	2018	2019	2020
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	6.32	18.50	21.77
Bank Umum Selain KUR	3.51	11.81	19.71
Bank Perkreditan Rakyat	1.52	7.37	6.38
Koperasi	12.00	30.94	26.33
Perorangan Dengan Bunga	2.67	8.15	8.84
Pegadaian	0.94	1.78	0.75
Perusahaan Leasing	8.50	24.43	20.76
KUBE/KUB	0.00	0.00	0.00
BUMDes	1.09	3.34	2.85
Lainnya	2.82	8.80	0.00

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Selain kredit usaha, kepemilikan Jaminan Sosial lainnya juga menjadi cerminan dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya jaminan sosial tersebut, diharapkan kondisi masyarakat lebih terjamin jika terjadi sesuatu dalam hidup mereka. Beberapa jaminan sosial yang tersedia diantaranya jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon pemutusan hubungan kerja.

Pada tahun 2020, rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial meningkat hampir pada setiap jenis jaminan sosial dibandingkan tahun sebelumnya. Jaminan sosial yang cukup banyak diterima rumah tangga adalah jaminan pensiun/veteran sebesar 6,03 persen. Kemudian diikuti oleh asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan jaminan hari tua masing-masing sebesar 5,36 persen, 3,49 persen, dan 3,36 persen. Sementara rumah tangga yang menerima pesangon PHK hanya sebesar 0,66 persen di tahun 2020.

Tabel 8.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Jenis Jaminan Sosial	2018	2019	2020
Jaminan Pensiun/Veteran	6.19	4.51	6.03
Jaminan Hari Tua	3.75	4.03	3.36
Asuransi Kecelakaan Kerja	5.00	4.59	5.36
Jaminan/Asuransi Kematian	4.41	3.46	3.49
Pesangon PHK	2.29	2.07	0.66

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Kepemilikan Aset

Indikator lainnya yang juga dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah kepemilikan aset. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, pada umumnya akan sejalan dengan ragam aset yang dimiliki. Dalam pengumpulan data Susenas, masyarakat ditanyakan terkait kepemilikan aset mulai dari tabung gas 5,5kg atau lebih, lemari es/kulkas, AC, pemanas air, emas/perhiasan (minimal 10gram), sepeda motor, perahu, perahu motor, mobil, serta lahan/tanah.

Mayoritas rumah tangga di Denpasar memiliki sepeda motor sebagai alat transportasi. Hal ini sangat wajar, mengingat sepeda motor merupakan sarana transportasi utama di Pulau Bali. Pada tahun 2020, sekitar 93,05 persen rumah tangga memiliki sepeda motor, turun dibanding tahun 2019 yang sebesar 93,46 persen. Sebaliknya, kepemilikan mobil mengalami kenaikan di tahun 2020. Jika pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang memiliki mobil sebesar 23,93 persen, kemudian naik hingga mencapai 28,59 persen di tahun 2020.

Kulkas juga menjadi salah satu aset yang tinggi persentase kepemilikannya di Denpasar. Sekitar 72,78 persen rumah tangga di Denpasar sudah memiliki kulkas pada tahun 2020. Jenis aset

lainnya yang juga cukup tinggi persentasenya adalah emas/perhiasan dengan berat minimal 10 gram serta tabung gas 5,5 atau lebih. Pada tahun 2020 persentasenya masing-masing sebesar 28,56 persen dan 21,59 persen. Rumah tangga yang memiliki AC juga cukup banyak di Kota Denpasar hingga mencapai 36,25 persen pada tahun 2020, setelah sebelumnya sebesar 29,50 persen.

Mulai tahun 2017, pada Survei Susenas terdapat penambahan rincian kepemilikan aset yaitu kepemilikan televisi layar datar minimal 30 inch dan tanah/lahan. Persentase rumah tangga yang memiliki aset tersebut pada tahun 2020 masing-masing sebesar 27,06 persen dan 33,15 persen.

Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Jenis Kepemilikan Aset	2018	2019	2020
Tabung Gas 5,5 Kg Atau Lebih	26.45	21.26	21.59
Lemari Es/Kulkas	68.71	68.95	72.78
AC	26.37	29.50	36.25
Pemanas Air	4.82	5.32	4.29
Emas/Perhiasan Minimal 10 Gram	32.12	29.19	28.56
Sepeda Motor	93.61	93.46	93.05
Perahu	0.36	0.17	0.40
Perahu Motor	0.29	0.07	0.15
Mobil	25.65	23.93	28.59
Televisi Layar Datar Minimal 30 Inch	26.06	28.81	27.06
Tanah/Lahan	37.36	34.20	33.15

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Korban Tindak Kejahatan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat keamanan di suatu

wilayah. Semakin sejahtera suatu wilayah, maka diasumsikan akan semakin rendah tingkat kejahatan yang terjadi. Selama tahun 2020, persentase penduduk Denpasar yang pernah menjadi korban kejahatan adalah sebesar 0,60 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 0,89 persen.

Dirinci menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan cenderung lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2020, sekitar 0,56 persen penduduk laki-laki menjadi korban kejahatan, menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 0,91 persen. Sama halnya dengan penduduk laki-laki, persentase penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan juga menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 0,86 persen, kemudian menjadi sebesar 0,64 persen pada tahun 2020.

Tabel 8.5 Persentase Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2018-2020

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
Laki-laki	1.59	0.91	0.56
Perempuan	1.01	0.86	0.64
Laki-laki + Perempuan	1.31	0.89	0.60

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DENPASAR**

Jl. Mulawarman No. 11, Denpasar 80111
Telp. (0361) 418770, Fax (0361) 434326
Email: bps5171@bps.go.id
Homepage: <http://denpasarkota.bps.go.id>

ISBN 978-602-6395-41-2 (PDF)



9 786026 395412